**PENGARUH PENERAPAN RANCANGAN ANGGARAN
DALAM MENCEGAH *FRAUD* SEKTOR PUBLIK
(STUDI KASUS KANTOR BUPATI
SIDENRENG RAPPANG)**

SKRIPSI

DIAN FAUZIA

NIM: 105731127318

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

**PENGARUH PENERAPAN RANCANGAN ANGGARAN
DALAM MENEGAH *FRAUD* SEKTOR PUBLIK
(STUDI KASUS KANTOR BUPATI
SIDENRENG RAPPANG)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PENERAPAN RANCANGAN ANGGARAN
DALAM MENCEGAH *FRAUD* SEKTOR PUBLIK
(STUDI KASUS KANTOR BUPATI
SIDENRENG RAPPANG)**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

DIAN FAUZIA

NIM: 105731127318

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah : 6-7)

**“It’s not easy, but that’s a life. Be Strong cause there are better days ahead.
Lets be grateful for what we have”**

(Mark Lee)

“Jangan cepat menyerah atas segala sesuatu, karena sensasi keberhasilan setelah berusaha keras, melatih hal yang tidak bisa menjadi bisa, rasanya luar biasa.”

(Rudeos Greyrat, Mushoku Tensei)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah Rabbil’alamin

Skripsi ini merupakan hasil karya dari saya untuk keluargaku, Ayah dan Ibu tercinta, kakak- kakakku tersayang, serta teman-teman yang selalu menyemangati, membantu dan mendoakan saya. Terima kasih atas dukungan kalian selama ini.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam
Mencegah *Fraud* Sektor Publik (Studi Kasus Kantor
Bupati Sidenreng Rappang)

Nama Mahasiswa : Dian Fauzia

NIM : 105731127318

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 08 Juli 2023 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Engang Winarsih, SE., M.Ak
NIDN. 0913029101

Syahidah Rahmah, SE.Sv.,M.E.I
NIDN. 2116019102

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Mira, SE., M.Ak
NBM : 1286844

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Dian Fauzia, NIM : 105731127318 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023M, Tanggal 19 Dzulhijjah 1444 H/ 08 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muchriana Muchran, SE., M.Si
2. Mira, SE., M.Ak
3. Nurhidayah, SE., M.Ak
4. Abdul Khaliq, SE., M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Fauzia
Stambuk : 105731127318
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah Fraud Sektor Publik (Studi Kasus Kantor Bupati Sidenreng Rappang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,

Dian Fauzia
NIM : 105731127318

Diketahui Oleh:

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.Ak
NBM : 1286844

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Fauzia
NIM : 105731127318
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah Fraud Sektor Publik (Studi Kasus Kantor Bupati Sidenreng Rappang)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 06 Muharram 1445 H
24 Juli 2023 M

Yang Membuat Pernyataan,

Dian Fauzia
NIM: 105731127318

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamban-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah *Fraud* Sektor Publik (Studi Kasus kantor Bupati Sidenreng Rappang”

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Laode Ahmad dan Ibu Hariana yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr,. H. Andi Jam'an, SE., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Muh. Nur R. SE.. MM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Endang Winarsih, SE.,M.Ak, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Syahidah Rahmah,SE.,Sy., M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Manajemen Angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Mbak Taylor Swift dan Abang-abang Day6 yang senantiasa menemani penulis dengan lagunya selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman NETIJEN Adhe, Rika, Hasri, Nining dan Amira yang selalu berdoa bersama, saling memberikan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman Akuntansi AK18G untuk kebersamaan, persahabatan dan kebaikan kalian selama ini.

12. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, seungguhnya penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 14 Januari 2023

(Dian Fauzia)

ABSTRAK

DIAN FAUZIA. 2023. Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah *Fraud* Sektor Publik. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh : Endang Winarsih dan Syahidah Rahmah

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *fraud* sektor publik. Variabel independen yang digunakan adalah anggaran berbasis kinerja. Variabel dependen yang digunakan adalah pencegahan *fraud*. Populasi dalam penelitian pegawai negeri sipil di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *nonprobability sampling*. Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja secara positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada sektor publik.

Kata Kunci : Anggaran Berbasis Kinerja, *Fraud*, Sektor Publik

ABSTRACT

DIAN FAUZIA. 2023. The Influence of Implementing Budget Plan in Preventing Fraud Public Sector. Thesis. Department of Accounting Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by: Mrs. Endang Winarsih and Mrs. Syahidah Rahmah

The Purpose of this research is to determine the effect of determine the effect of implementing budget plan for preventing fraud public sector. Independent variables was used performance-based budgeting. Dependent variable was used preventing fraud. The research population was civil servants in Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). This study used a nonprobability sampling. Analysis method of this research used simple linear regresion. The result of this research showed that the variables of performance-based budgeting has significantly effect to preventing fraud in public sector.

Key words : *Performance-based Budgeting, Fraud, Public Sector*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Fraud Tree	9
2. Pengertian Fraud	10

3. Proses Perancangan Anggaran	10
4. Pengertian Anggaran	12
5. Sektor Publik.....	12
B. Tinjauan Empiris.....	13
C. Kerangka Pikir	18
D. Hipotesis.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Fokus Penelitian.....	21
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
D. Jenis dan Sumber Data	21
E. Populasi dan Sampel.....	22
F. Metode pengumpulan Data	23
G. Definisi Operasional Variabel.....	23
H. Metode Analisis Data.....	25
I. Uji Hipotesis	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	27
B. Hasil Penelitian.....	30
C. Pembahasan	35
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Sidrap.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	24
Tabel 4. 1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	29
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas	31
Tabel 4. 3 Hasil Uji Reliabilitas.....	32
Tabel 4. 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi	33
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Sederhana.....	34
Tabel 4. 6 Coefficients	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu istilah yang sering kali kita dengar adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dan periodik berdasarkan program kegiatan organisasi atau instansi yang akan dilakukan pada suatu periode serta dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran menentukan besar biaya yang mungkin dikeluarkan dan besar pendapatan yang mungkin masuk, dan juga kearah mana dana yang tersedia perlu disalurkan (Salam, 2020).

Anggaran memiliki beberapa manfaat yakni, pertama anggaran dapat menerjemahkan rencana kegiatan yang masih abstrak dan umum menjadi kegiatan yang lebih detail dan spesifik, kedua anggaran juga dapat memenuhi konsep dari *responsibility accounting* dan yang ketiga, anggaran dapat digunakan sebagai alat dalam alokasi dana bagi kegiatan prioritas ataupun kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan maksimal (Biswan dan Widiyanto, 2019).

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan telah dijelaskan mengenai anggaran yang juga berfungsi sebagai alat stabilitas keuangan karena disusun berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan untuk memperkirakan defisit anggaran serta sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut. Selain itu, proses pengelolaan anggaran telah diatur pada Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Tahun 2003 yaitu, keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Disebutkan juga pada pasal 3 ayat (4) UU No 17 Tahun 2003 bahwa anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Proses penganggaran pada sektor publik terus mengalami perbaikan seiring berjalannya waktu, dimulai dari perbaikan manajemen pengelolaan keuangan negara yang ditandai dengan penerapan pendekatan penganggaran yang baru yakni konsep *better budgeting* yang ditunjukkan dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM (Biswan dan Widiyanto, 2019).

Anggaran memiliki banyak fungsi yaitu (1) sebagai alat perencanaan dalam hal ini anggaran berfungsi untuk merencanakan tindakan dan kegiatan pemerintah kedepannya, (2) sebagai alat kebijakan fiskal yang dimana anggaran dapat digunakan dalam menstabilkan pertumbuhan ekonomi, melalui anggaran dapat diketahui bagaimana arah kebijakan sehingga dapat memperkirakan, mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan sehingga dapat memperkirakan pertumbuhan ekonomi, (3) sebagai alat politik dalam membentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan dari pihak legislatif atas penggunaan dana publik, (4) sebagai alat koordinasi dan komunikasi yang mana sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah dan sebagai alat komunikasi antar unit kerja eksekutif serta mengingat anggaran ini perlu dikomunikasikan ke seluruh bagian dalam organisasi, dan yang terakhir (5) sebagai alat pengendalian (BPKAD Banjar, 2018) adapun proses pengendalian ini dilakukan dengan

tujuan menjamin: (a) meningkatnya kualitas pembelanjaan (*quality spending*) anggaran; (b) kepatuhan (*compliance*) terhadap standar akuntansi keuangan negara; dan (c) kepatuhan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Dengan pengendalian ini, diharapkan agar kualitas penganggaran yang meningkat mampu memastikan penganggaran anggaran menjadi tepat sasaran (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Proses penerapan anggaran belanja harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dengan tahapan yang dimulai dari dibuat dan direncanakannya rencana kerja dan anggaran (RKAP) yang kemudian disetujui oleh RUPS dan berikutnya terus dipertajam dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) seriap triwulannya. RKO yang telah dibuat harus menjadi tahap minimal terkait keuangan dan operasionalnya, sehingga hasil dari operasional yang telah dijalankan tidak boleh lebih buruk dibanding RKO yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku (Putri et al., 2021).

Sejak dulu hingga sekarang kasus *Fraud* menjadi salah satu masalah yang masih belum bisa dituntaskan baik itu dari sektor publik maupun swasta. *Fraud* atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam menghindari kewajiban dalam mendapatkan keuntungan yang menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun nonfinansial bagi pihak lainnya (Aksa, 2018).

Tuanakotta (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *fraud*, juga merupakan sebuah tindak kejahatan yang bahkan ketika terungkap hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan *fraud* yang sebenarnya terjadi dan

dapat ditangani dengan tindakan pencegahan dan deteksi (Saputra et al., 2019).

The Association of Certified *Fraud* Examiners (ACFE) secara garis besar membagi *Fraud* menjadi tiga jenis berdasarkan perbuatannya yakni, penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) seperti penyalahgunaan ataupun pencurian aset pihak lain, pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statements*) dalam hal ini perilaku menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya seperti merekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan serta yang terakhir yakni korupsi (Aksa, 2018). *Fraud* ini berdampak besar seperti adanya *integrity risk* yaitu ketika adanya kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat mengurangi nama baik atau reputasi perusahaan dimata dunia atau bahkan dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mempertahankan keberlangsungannya karena kurang dilirik oleh investor setelah jatuhnya reputasi tersebut (N. A. Sari, 2021).

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 juga menjelaskan bahwa *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan yang tergolong sebagai tindakan *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak

pidana perbankan dan tindakan lain yang dapat disamakan dengan *Fraud* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada era pandemik seperti sekarang, *Fraud* ini masih sering terjadi mengingat pandemik virus Corona ini telah menciptakan situasi yang dapat menjadi peluang bagi para pelaku *Fraud*, berdasarkan situs justice.gov seorang karyawan SES NASA dijatuhi hukuman 18 bulan penjara setelah melakukan penipuan bernilai lebih dari \$350.000 dalam bentuk pinjaman dan tunjangan bantuan ekonomi Covid-19, CNN juga menyertakan kasus lainnya yakni adanya karyawan pabrik yang memalsukan hasil tes Covid-19nya agar dapat rehat dari pekerjaannya sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena aktivitas produksi yang terhambat karena aktivitasnya dihentikan dan harus melakukan pensterilan pada pabriknya (Integrity Indonesia, 2021).

Teguh Arifiyadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menambahkan bahwa setiap minggunya terdapat 5.000 kasus tindakan penipuan atau *Fraud* yang masuk dalam website Kemkominfo tercatat sebanyak hampir 200.000 kasus sejak Maret 2020 hingga Oktober 2021. Disebutkan juga bahwa media yang paling banyak digunakan oleh pelaku adalah Whatsapp dan Instagram (CNBC Indonesia, 2021).

Fraud khususnya korupsi tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat saja namun juga terjadi pada tingkat kabupaten yang skalanya lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah pusat, misalnya salah satu kasus di kabupaten Sidenreng Rappang pada 11 Januari 2021 3 (tiga) "oknum" pejabat pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang diantaranya Kepala

Dinas Pendidikan kab. Sidrap Syahrul Syam, Kasubag Keuangan Ahmad dan seorang tenaga honorer Neldayanti masing-masing divonis 4 tahun penjara atas kasus korupsi setelah terbukti bersalah dalam proses penyelidikan sebelumnya (Cahyadi, 2021).

Beberapa bulan setelah kasus korupsi sebelumnya tepatnya pada 14 Desember 2021 lagi-lagi diberitakan mengenai dugaan korupsi penimbunan RS Pratama Sidrap. Dalam wawancaranya Kasi Intel Kejari Sidrap Adityo Ismutomo menjelaskan bahwa Kejari (Kejaksaan Negeri) Sidrap telah menetapkan 1 tersangka dengan inisial N yang merupakan salah satu pegawai Dinkes Sidrap, disebutkan juga bahwa "oknum" tersebut merupakan PPK dari hal tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus penimbunan proyek RS Pratama di Tanru Tedong yang menelan anggaran APBD sekitar 1,9 Miliar pada tahun 2020 tersebut (Ajatappareng Online, 2021)

Korupsi yang merupakan salah satu jenis tindakan *Fraud* juga semakin membudaya dalam pemerintahan ini juga merupakan akar dari mindset kapitalisme kontemporer yang selalu menginginkan keuntungan dibalik sikap amoral yang melanggar nilai dan norma (Asad dan Musyarofah, 2019). Pada Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat keuangan negara atau perekonomian negara. korupsi ini juga dapat disebut sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada teori *Fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey menyatakan bahwa kecurangan atau *Fraud* ini disebabkan oleh tiga faktor utama yakni adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalitas (*rationalization*). Wolfie dan Hermason (2004) kemudian memperkenalkan versi ekstensi dari *Fraud triangle* yakni *Fraud diamond* yang menambahkan *capability* sebagai salah satu faktornya (BINUS Faculty of Economics and Communication, 2021).

Dewi (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah kota Cimahi secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh penerapan rancangan anggaran berbasis kinerja, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia serta akuntabilitas berpengaruh secara positif dalam mencegah *fraud* pada pengelolaan dana desa, maka dalam hal ini penulis berniat untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah *Fraud* Sektor Publik (Studi Kasus Kantor Bupati Sidenreng Rappang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *fraud* sektor publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *fraud* sektor publik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk memberikan informasi tambahan yang dapat memperluas wawasan bagi para akademis dimana dapat mengetahui mengenai bagaimana rancangan anggaran yang disusun dengan seksama dapat mempengaruhi dan mencegah *Fraud* pada sektor publik dan dapat mengembangkannya agar tindak *Fraud* khususnya pada sektor publik dapat diberantas.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan semoga bermanfaat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai salah satu cara dalam mencegah *Fraud* utamanya pada sektor publik dan mengaplikasikannya dalam masyarakat khususnya dalam pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Fraud Tree*

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mengemukakan bahwa tingkat kejahatan *fraud* terus meningkat setiap tahunnya melalui berbagai macam skema dengan menginduk kepada tiga unsur utama, yaitu *asset misappropriation*, *fraudulent statement*, dan korupsi (Nathanael, 2022).

- a. *Asset Misappropriation* atau penyalahgunaan aset merupakan suatu bentuk kecurangan berupa pencurian ataupun penggunaan aset instansi atau lembaga tanpa izin untuk keperluan pribadi baik itu berupa *cash* seperti penggelapan kas, menahan cek, maupun *noncash* seperti penggunaan fasilitas instansi untuk keperluan pribadi.
- b. *Fraudulent Statement* atau *fraud* atas laporan keuangan merupakan bentuk kesalahan pada jumlah atau pengungkapan data dalam laporan keuangan yang disengaja dan didesain untuk merugikan pengguna laporan keuangan dan menguntungkan pihak tertentu. *Fraudulent statement* dibagi menjadi dua yaitu *financial* dan *non-financial*.
- c. Korupsi adalah bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan suatu anggaran milik negara, instansi maupun perusahaan yang dilakukan hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok tertentu dan

merugikan pihak lain. Tindakan korupsi dikelompokkan menjadi konflik kepentingan dan memberi atau menerima suap.

2. Pengertian *Fraud*

Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam menghindari kewajiban dalam mendapatkan keuntungan yang menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun nonfinansial bagi pihak lainnya (Aksa, 2018).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* secara garis besar *Fraud* terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan perbuatannya yakni, penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*) seperti penyalahgunaan ataupun pencurian aset pihak lain, pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent statements*) dalam hal ini perilaku menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya seperti merekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan serta yang terakhir yakni korupsi (Aksa, 2018).

3. Proses Perancangan Anggaran

Dalam buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran dijelaskan bahwa Kementerian/Lembaga dimanakan dalam mengelola keuangan negara dengan proses perencanaan dan penganggaran sebagai salah satu tugasnya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Pada proses perancangannya, anggaran dapat dibagi menjadi beberapa proses dan salah satunya adalah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja. Pada dasarnya penerapan penganggaran berbasis kinerja mengubah pola pengalokasian anggaran dari yang semula yakni berdasarkan input yang mana fokus pengukuran program/kegiatan yang

disusun berdasarkan besarnya jumlah dana untuk mencapai hasil menjadi berbasis output yang mana meninjau hasil yang ingin dicapai dari penggunaan dana yang ada. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Output kegiatan harus terpapar secara jelas begitu juga dengan asumsi yang digunakan baik kuantitas maupun kualitasnya serta relevansi komponen input yang dapat menjadi dasar tahapan dalam rangka pencapaian *output* kegiatan. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021).

Dalam menyusun penganggaran berbasis kinerja dituntut adanya keterkaitan yang erat antara kinerja yang diharapkan dengan anggaran yang akan disediakan melalui perencanaan strategik yang disusun secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti dana yang ada, sumber daya manusia, dan metode kerja yang secara akurat dan rasional dapat diinformasikan dalam suatu anggaran sehingga dapat dinilai kewajarannya sebagai bentuk Analisa Standar Biaya atau biasa disingkat ASB (Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan pada penganggaran berbasis kinerja ini meliputi:

- a) Masukan (*input*) yang meliputi dana atau anggaran, SDM, data dan informasi yang dibutuhkan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan.
- b) Keluaran (*output*) merupakan hasil proses dari masukan yang telah ditetapkan.

- c) Hasil (*outcome*) merupakan hasil nyata dari suatu keluaran.
- d) Manfaat (*benefit*) merupakan nilai tambah dari hasil yang muncul beberapa saat setelah penerapannya.
- e) Dampak (*impact*) merupakan akibat yang muncul dari pengaruh manfaat.

4. Pengertian Anggaran

Menurut Miller dan O'Leary (1997) Anggaran merupakan salah satu istilah yang seringkali kita dengar adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dan periodik berdasarkan program kegiatan organisasi atau instansi yang akan dilakukan pada suatu periode serta dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran menentukan besar biaya yang mungkin dikeluarkan dan besar pendapatan yang mungkin masuk, dan juga kearah mana dana yang tersedia perlu disalurkan (Salam, 2020).

5. Sektor Publik

Akuntansi secara umum berarti proses pencatatan yang diawali dengan identifikasi kemudian mengukur, mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang akan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sedangkan sektor publik merupakan sebuah entitas yang meski dengan sumber daya ekonomi skala besar serta melakukan transaksi ekonomi dan keuangan tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya. Adapun Akuntansi Sektor Publik sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai alat analisis dan informasi pemerintahan, baik itu bagi manajemen pemerintah maupun bagi masyarakat serta alat pertimbangan dalam mengambil keputusan

mengenai kebijakan atau program-program yang akan dilaksanakan serta meninjau kinerja dan hasil dari kebijakan dan program yang telah ditetapkan tadi (Sarwenda Biduri, 2018).

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang relevan dan saling terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Selviani (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Instansi Pemerintah Kota Cimahi" menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja mempengaruhi akuntabilitas secara positif dan signifikan.

Saputra et al (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa" menjelaskan bahwa sumber daya manusia dan akuntabilitas masing-masing berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

Pada penelitian Biswan dan Widiyanto (2019) yang berjudul "Peran *Beyond Budgeting Entry Scan* untuk Mengatasi Permasalahan Penganggaran Sektor Publik" dengan *beyond budgeting entry scan* sebagai variabel independen dan permasalahan penganggaran sektor publik sebagai variabel dependen menggunakan studi kasus sebagai alat analisis menunjukkan bahwa *Beyond Budgeting Entry Scan* meninjau tiga permasalahan utama pada penganggaran, diantaranya responsivitas anggaran yang dianggap masih kurang, level keterlibatan dalam proses

penyusunan anggaran yang lemah, dan tidak efisienyai distribusi sumber daya. Dijelaskan juga bahwa kunci dalam mengatasi permasalahan penganggaran pada sektor publik adalah dengan penganggaran yang responsif, keterlibatan dalam proses penyusunannya serta distribusi sumber daya yang efisien.

Futri Safitri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang” menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja secara positif dan signifikan mempengaruhi efektivitas realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Tangerang Selatan.

Ririnda dan Sudaryati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja" dengan ketepatan anggaran, sistem pengendalian manajerial serta sistem pelaporan sebagai variabel independen dan Akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen menggunakan teknik analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajerial dan ketepatan anggaran, akan tetapi sistem pelaporan tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Primastiwi *et al.*, (2020) dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kinerja Sektor Publik dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi” menjadikan partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan sebagai variabel independen, kinerja sektor publik sebagai variabel dependen dan

budaya organisasi sebagai variabel moderasi kemudian dianalisis dengan menggunakan uji regresi berganda dan uji selisih nilai mutlak menunjukkan bahwa kinerja sektor publik dipengaruhi secara signifikan oleh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan akan tetapi budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran dan sistem akuntansi keuangan terhadap kinerja sektor publik.

Kristiyani dan Hamidah (2020) yang berjudul “Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah *Fraud* Pada Sektor Publik di Era Digital” menggunakan kajian literatur sebagai teknik analisisnya dan menjelaskan bahwa *Fraud* sektor publik di era digital berupa pemanfaatan dari miskonsepsi dari peranan teknologi digital terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik, optimalnya kesempatan dalam melakukan tindakan *Fraud* dengan pendayagunaan teknologi digital, pemanfaatan dari kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi digital yang menyebabkan *human error*. Akuntansi sektor publik dapat melakukan tindak pencegahan dengan melakukan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang memungkinkan tindak *Fraud* terjadi seperti *performance*, *accountability*, pendekatan dua paradigma serta strategi preventif.

Pada penelitian Bachtiar dan Eliyana (2020) yang berjudul “Determinan Upaya Pencegahan *Fraud* Pemerintah Desa” menjadikan pencegahan *Fraud* sebagai variabel independen dan pemerintah desa sebagai variabel dependen dengan teknik analisis berupa uji deskriptif statistik menggunakan tes koefisien determinasi, uji T dan uji F menunjukkan bahwa budaya etis dan pengendalian internal secara positif dapat mempengaruhi serta meningkatkan pencegahan *Fraud* akan tetapi

karakteristik personal tidak mempengaruhi upaya pencegahan tindak *Fraud*, selain itu umur aparat pemerintah desa dianggap tidak mempengaruhi tindak *Fraud* di Kabupaten Bulukumba.

Pada penelitian Aksa (2018) yang berjudul "Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan *Fraud Triangle*" menggunakan teknik analisis berupa studi literatur dengan hasil penelitian yang secara garis besar menyimpulkan 3 poin yakni yang pertama terdapat empat motif dalam melakukan *Fraud* dalam hal ini korupsi diantaranya *corruption by greed*, *corruption by opportunity*, *corruption by need* dan *corruption by exposures*. pada poin kedua dijelaskan bahwa korupsi dapat di deteksi dan dicegah dengan pemerlakuan pemberian sanksi yang lebih berat, perbaikan sistem pengendalian internal, meningkatkan moral dan etika serta secara berkala melakukan investigasi laporan keuangan. pada poin terakhir dijelaskan bahwa *Fraud triangle* memberikan tujuh kontribusi dalam mencegah korupsi adapun tujuh kontribusi tersebut adalah: (1) menegakkan supremasi hukum dengan kuat karena hukum merupakan pilar keadilan, (2) perbaikan sistem pengendalian internal agar fungsi pengawasan dapat berjalan sebagaimana fungsinya, (3) peran aktif anti korupsi baik oleh aktivis, (4) menanamkan pendidikan anti korupsi pada generasi muda serta nilai-nilai kehidupan, (5) bersama-sama berkomitmen tegas dalam menciptakan kondisi daerah yang bebas korupsi, (6) menanamkan pendidikan moral, (7) secara insentif memberikan pendidikan religi utamanya dalam keluarga.

Anisah dan Falikhatun (2021) dengan penelitian berjudul "Realitas Pengawasan di Tubuh Pemerintahan Desa terhadap Korupsi" menggunakan teknik studi kasus dalam menganalisis data dan memperoleh hasil penelitian

yang memperlihatkan bahwa secara pengawasan dan pengendalian korupsi yang terjadi di desa sudah berjalan secara menyeluruh hanya saja pengendalian yang berkaitan dengan pengawasan yakni SDM masih lemah. Walaupun tidak banyak, korupsi di Desa masih tetap ada sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan di tingkat pemerintahan desa seperti menggunakan sistem teknologi modern dan menyalurkan keuangan dalam bentuk non tunai.

Aksa *et al.*, (2020) pada penelitiannya yang berjudul "*The Urgency of Rationalization for Unethical Behaviour and Accounting Fraud*" dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi menemukan bahwa orang yang sering berperilaku tidak etis selalu melakukan kecenderungan kecurangan dengan mencari pembenaran atau melakukan rasionalisasi atas tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dicegah dengan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya. Dengan penurunan tingkat rasionalitas, kecurangan akuntansi (khususnya pada sektor publik) akan menurun dan sebaliknya.

Amaliyah (2019) pada penelitiannya yang berjudul "*Apakah Accounting Fraud* Disebabkan Kesalahan Individu atau Budaya Organisasi" menggunakan regresi *multiple* sebagai metode analisis dan Hasil analisis tersebut menemukan bahwa individu merupakan penyebab terbesar adanya *accounting Fraud*. Hal ini terjadi karena adanya keinginan dan perilaku subjektif yang berimplikasi pada budaya organisasi dan munculnya *accounting Fraud*. Cara untuk mengatasinya adalah dengan menciptakan sistem pengendalian dan media untuk melakukan pelaporan, serta

memberikan hukuman bagi pelaku. Audit berkala dan larangan praktik kolusi juga dapat memberantas *accounting Fraud*.

Hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai rancangan anggaran yang apabila realisasinya benar-benar berpedoman pada rancangan anggaran yang telah disusun tersebut dapat menjadi salah satu hal yang dapat menutup kemungkinan adanya “*opportunity/kesempatan*” sehingga dapat mencegah *Fraud* utamanya pada sektor publik.

C. Kerangka Pikir

Secara garis besar anggaran dapat dijelaskan sebagai proses penyusunan pendapatan dan pembiayaan sebagai suatu rancangan keuangan dan kemudian dialokasikan ke berbagai kegiatan yang telah dikelompokkan ke dalam program dengan menyesuaikan tugas dan tanggungjawab dari satuan kerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai (Nurkholis dan Moh., 2019). Anggaran juga dapat diartikan sebagai penafsiran dari strategi maupun perencanaan pengalokasian dana bagi program-program yang telah disusun, tahapan penganggaran ini wajib disusun dengan seksama mengingat anggaran yang tidak efektif dan efisien dapat menggagalkan rencana atau program-program yang telah disusun sehingga membuka peluang bagi para pelaku *Fraud* atau kecurangan (Nurkholis dan Moh., 2019).

Adapun *Fraud* itu sendiri merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank,

nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegiatan yang tergolong sebagai tindakan *Fraud* adalah kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan dan tindakan lain yang dapat disamakan dengan *Fraud* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tercantum pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019.

Faktor penyebab terjadinya *Fraud* menurut teori *Willingness and Opportunity* adalah faktor kemauan (*willingness*) yang merupakan faktor internal yang mendorong seseorang dalam melakukan tindak korupsi baik itu karena faktor tekanan maupun karena faktor keserakahan dan faktor kesempatan (*opportunity*) yang merupakan faktor eksternal yang muncul akibat lemahnya sistem dan kurangnya pengawasan.

Berdasarkan penjelasan tersebut kerangka pemikiran **“Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah *Fraud* Sektor Publik.”**

Secara sederhana memiliki gambaran seagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Berdasarkan hal-hal yang sebelumnya dipaparkan diperoleh hipotesis diduga terdapat pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *Fraud* sektor publik di Kantor Bupati Sidenreng Rappang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif sebagaimana Sugiyono dalam penelitian Safitri (2022) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk menganalisis dampak antara variabel satu dan variabel lainnya, dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu penerapan anggaran (X) sebagai variabel bebas (*independen*) dan mencegah *fraud* sektor publik (Y) sebagai variabel terikat (*dependen*).

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada pembuktian pengaruh penerapan rancangan anggaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu pendekatan dalam membuat rancangan anggaran terhadap pencegahan *Fraud* pada sektor publik.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Bupati Sidenreng Rappang dengan jangka waktu penelitian kurang lebih 2 bulan dan akan dimulai pada bulan November hingga bulan Januari tahun 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber langsung kemudian dikumpulkan dan umumnya bersifat spesifik sesuai dengan kebutuhan

peneliti, kuesioner dan wawancara menjadi sumber data pada penelitian ini (Syafnidawati, 2020).

2. Data Sekunder

Adalah data yang telah diolah sebelumnya dan diperoleh peneliti secara tidak langsung data tersebut dapat berupa catatan, dokumen publikasi pemerintah, atau laporan historis yang telah disusun dalam bentuk arsip atau sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan penganggaran dan pencegahan *Fraud* sektor publik dari tahun 2021 (Syafnidawati, 2020)

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari subjek yang bersifat general atau umum dari topik atau subjek yang akan diteliti (Universitas Raharja, 2020). Populasi yang pada penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Sidenreng Rappang yang berjumlah 77 orang.

2. Sampel

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak dipilih secara acak. Teknik pemilihan sampel *nonprobability sampling* memiliki beberapa macam cara pengambilan sampel, pada penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh (*Saturation Sampling*) yakni teknik pengambilan sampel yang menggunakan semua populasi sebagai sampel dengan syarat populasinya tidak banyak dan atau peneliti ingin membuat simpulan

umum dengan kemungkinan kesalahan yang sangat kecil (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, 2017).

Adapun sampel atau responden penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Sidenreng Rappang yang berjumlah 77 orang.

F. Metode pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket merupakan kumpulan dari beberapa pertanyaan tertulis yang diformulasikan dengan menentukan alternative jawaban dan kemudian dibagikan kepada sejumlah responden untuk memperoleh informasi. Penelitian ini menjadikan 77 orang aparat pemerintah yang terlibat dalam penyusunan anggaran dengan kriteria tertentu sebagai responden (Jaya, 2020).

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data berupa dokumen, catatan, foto, laporan maupun rekaman yang relevan mengenai perancangan anggaran serta pencegahan *Fraud* sektor publik di kabupaten sidenreng rappang. Hasil penelitian ini akan lebih kredibel setelah didukung oleh dokumen yang ada untuk semakin memperkaya informasi yang benar-benar yang diperoleh dari data yang dibutuhkan oleh peneliti (Jaya, 2020).

G. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan definisi dari perumusan yang berdasarkan pada karakteristik yang dapat diukur dengan observasi untuk menentukan prosedur serta aturan dalam mengukur variabel penelitian.

Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Dimensi	Indikator
Anggaran Berbasis Kinerja (X) menggunakan indikator dari (Nst & Handoko, 2018)	Bastian (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu teknik penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan beban kerja dan biaya unit dari setiap program/kegiatan yang terstruktur (Safitri, 2022)	Anggaran Berbasis Kinerja	Tahap Persiapan Tahap Ratifikasi Tahap Implementasi Tahap Pelaporan dan Evaluasi
Pencegahan Fraud (Y) menggunakan indikator <i>Fraud Tree</i>	<i>Fraud</i> atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu dalam menghindari kewajiban dalam mendapatkan keuntungan yang menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun nonfinansial bagi pihak lainnya (Aksa, 2018).	<i>Fraud</i>	<i>Asset Misappropriation</i> <i>Fraudulent Statement</i> Korupsi

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana karena pada penelitian ini hanya ada satu variabel independen dengan SPSS sebagai alat ukurnya (Management, 2019).

Penelitian ini menggunakan skala likert dalam mengukur jawaban dari setiap responden dan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji determinasi serta uji hipotesis.

I. Uji Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini dapat diuji dengan menggunakan metode Regresi Sederhana dan Uji T sebagai metode analisis data dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis regresi sederhana

Merupakan hubungan antara satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau variabel dependen dengan tujuan untuk memperkirakan nilai rata-rata suatu populasi berdasarkan nilai dari variabel bebasnya serta dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan independen tadi (Parulian, 2020).

Hubungan antar variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + B_x$$

Keterangan :

Y = Pencegahan *Fraud* sektor public

a = Konstanta

B = Koefisien regresi (pengaruh positif dan negatif)

x= Rancangan anggaran

2. Uji Partial

Uji partial yang biasa dikenal dengan sebutan uji T merupakan cara untuk menguji pengaruh antara seriap variabel bebas atau independen terhadap 1 variabel terikat atau dependen (Parulian, 2020).

Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara t hitung dan t tabel yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Ket: b = Koefisien regresi b

Sb = kesalahan baku koefisien regresi

Adapun uji koefisien regresi dengan uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

H₀:b > 0,5 artinya rancangan anggaran berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *Fraud* sektor publik

H₀:b < 0,5 artinya rancangan anggaran berpengaruh secara negatif terhadap pencegahan *Fraud* sektor publik

Selain itu jika

- a. nilai t hitung $\leq$ nilai t tabel maka H₀ dan H₁ ditolak
- b. nilai t hitung > nilai t tabel maka H₀ dan H₁ diterima

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah singkat kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (BKAD Sidrap).

Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta diputuskannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah menjadi alasan terbentuknya Unit Satuan Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan salah satu dari 8 unit satuan kerja dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang membawahi 1 Sekertaris, 4 Bidang, 3 Sub Bagian dan 8 Sub Bidang dengan fungsi dan tugasnya dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kini menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah Sidrap, 2016).

Fungsi dan Tugas dari BKAD berdasarkan aturan yang berlaku adalah untuk merumuskan kebijakan umum dalam bidang pengelolaan anggaran serta aset daerah, melaksanakan pembendaharaan dan untuk melaksanakan akuntansi dari pemerintah daerah (Badan Keuangan dan Aset Daerah Sidrap, 2016).

2. Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Visi:

Sidenreng Rappang sebagai Pusat Agribisnis Modern dan Lima Terbaik di Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Manusia.

Misi :

- a. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pembangunan berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi.
- b. Mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan agribisnis yang berwawasan lingkungan.
- c. Membangun kemandirian masyarakat melalui pendekatan kelembagaan dengan mengembangkan kemitraan usaha.
- d. Mewujudkan aparatur daerah yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan dan pengelolaan administrasi daerah yang baik dan bersih.
- e. Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis kreatif dan budaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- f. Mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal sebagai pedoman dan sumber kearifan guna meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BKAD Sidrap

4. Identitas Responden

Penyebaran kuesioner pada pegawai di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dimulai pada tanggal 9 Januari 2023 sebanyak 100 rangkap edangkan jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 77 rangkap dan hasil kuesioner yang telah diisi oleh setiap pegawai didapatkan secara bertahap. Responden dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persen %
Laki-Laki	36	46,25
Perempuan	41	46,75
Total	77	100

Berdasarkan data dari tabel 4.1 diatas, total responden adalah 77 orang dengan rincian responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 36 orang atau sebesar 46,25% sedangkan responden atau pegawai BKAD yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 41 orang atau 47,75%.

B. Hasil Penelitian

Hasil Penelitian pada Bab IV ini akan membahas mengenai hasil pengelolaan dan analisis data yang telah diperoleh dari penyebaran kuesioner di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan bantuan aplikasi SPSS sebagai alat analisis data statistiknya dengan hasil sebagai berikut:

1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kevalid-an angket kuesioner yang akan digunakan oleh peeliti untuk mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk meninjau tingkat konsistensi dari angket kuesioner sehingga dapat diandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan kuesioner yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda. Uji vadititas dan uji reliabilitas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa R_{tabel} dari sampel (N) =77 adalah sebesar 0,227. Sehingga menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Rhitung	Keterangan	
Anggaran Berbasis Kinerja	P1	0,271	Valid
	P2	0,331	Valid
	P3	0,322	Valid
	P4	0,419	Valid
	P5	0,338	Valid
	P6	0,325	Valid
	P7	0,403	Valid
	P8	0,341	Valid
	P9	0,359	Valid
	P10	0,412	Valid
	P11	0,357	Valid
	P12	0,399	Valid
	P13	0,419	Valid
	P14	0,418	Valid
	P15	0,416	Valid
	P16	0,456	Valid
	P17	0,550	Valid
	P18	0,424	Valid
Fraud	P19	0,319	Valid
	P20	0,266	Valid
	P21	0,445	Valid
	P22	0,334	Valid
	P23	0,39	Valid
	P24	0,455	Valid
	P25	0,298	Valid
	P26	0,371	Valid
	P27	0,401	Valid
	P28	0,419	Valid
	P29	0,411	Valid
	P30	0,391	Valid
	P31	0,415	Valid
	P32	0,327	Valid
	P33	0,327	Valid
	P34	0,411	Valid
	P35	0,535	Valid
	P36	0,406	Valid
	P37	0,455	Valid

Suber:Data Diolah SPSS, 2023

Instrumen penelitian yang digunakan dapat dinyatakan valid apabila mampu mengukur data yang diperoleh dari variabel yang ditentukan. Syarat minimum dalam penentuan valid atau tidaknya data yang diperoleh adalah apabila r hitung $>$ dari r tabel (0,227). Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa semua butir instrument variabel X (Anggaran Berbasis Kinerja) yang dinyatakan dalam 18 pernyataan dan instrument variabel Y (Fraud) yang dinyatakan dalam 19 butir pernyataan adalah valid karena r hitung $>$ 0,227 sehingga data kuesioner ini dapat dianggap representatif.

b) Uji Reliabilitas

Uji ini bertujuan untuk meninjau tingkat konsistensi dari indikator variabel penelitian atau instrument penelitian, instrument dianggap handal apabila tingkat konsistensinya tinggi yang ditandai dengan nilai alpha cronbach nya sebesar 0,6 atau lebih. Maka apabila nilai reliabilitas $>$ nilai alpha cronbach maka butir pernyataan kuesioner dianggap reliabel. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Anggaran Berbasis Kinerja	0,668	Reliabel
Fraud	0,687	Reliabel

Sumber: Data Diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa semua butir instrument variabel X (Anggaran Berbasis Kinerja) dan variabel Y (*Fraud*) memiliki koefisien yang lebih besar dari 0,6 sehingga dianggap reliabel. Dari hasil uji reliabilitas tersebut, dapat

disimpulkan bahwa data kuesioner pada penelitian ini reliabel, dalam artian dapat menunjukkan data yang diteliti secara tepat.

2. Uji Hipotesis

a. Analisis Koefisien Determinasi (*R Square*)

Menentukan besar nilai korelasi atau tingkat hubungan antar variabel. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa koefisien determinasi pada penelitian ini sebesar 0,984 yang artinya pengaruh variabel independen (anggaran berbasis kinerja) terhadap variabel dependen (*fraud*) adalah sebesar 98,4% sedangkan sisanya yaitu 1,6% dipegaruhi oleh faktor lain.

Tabel 4. 4 Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,984	,984	,477

a. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber : Data diolah SPSS, 2023

b. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana sebagai metode analisisnya demi meninjau pengaruh antara variabel (X) dan variabel (Y). Hipotesis pada penelitian ini yaitu diduga terdapat pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *Fraud* sektor publik di Kantor Bupati Sidenreng Rappang. Pedoman pengambilan keputusan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

- 1) Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka hipotesis diterima
- 2) Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka hipotesis ditolak

Berdasarkan pedoman tersebut serta dengan merujuk pada tabel 4.6 dibawah ini maka diketahui bahwa nilai signifikansi pada penelitian ini adalah 0,00 karena nilai sig. nya $<0,05$ maka H_0 pada penelitian ini ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel X (Anggaran Berbasis Kinerja) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y (*Fraud*).

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Sederhana

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1041,085	1	1041,085	4580,896	,000 ^b
	Residual	17,045	75	,227		
	Total	1058,130	76			

a. Dependent Variable: *Fraud*

b. Predictors: (Constant), Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Tabel 4. 6 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,571	1,266		,451	,653
	Anggaran Berbasis Kinerja	1,048	,015	,992	67,682	,000

a. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber : Data diolah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai *Constant* (a) sebesar 0,571 sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar 1,048. Persamaan regresi sederhana dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,571 + 1,048X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- 1) Konstanta (a) = 0,571 menunjukkan bahwa konstanta tersebut bernilai positif sehingga jika variabel independen yakni Anggaran berbasis kinerja bernilai = 0 maka variabel dependen yaitu *fraud* juga akan bernilai 0,571.
- 2) Koefisien X = 1,048 menunjukkan bahwa variabel dependen atau variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh searah (positif) terhadap variabel dependen atau variabel *fraud* yang artinya setiap kenaikan satu point variabel anggaran berbasis kinerja maka variabel *Fraud* akan meningkat sebesar 1,048.
- 3) Persamaan ini menunjukkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara positif terhadap variabel *fraud* sebesar 1,048.

C. Pembahasan

Secara garis besar, anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah pendekatan dalam proses perancangan anggaran yang memperhatikan antara pendanaan (*input*) dan dengan *output* berupa hasil yang diharapkan dalam hal ini realisasi dan kinerja keuangan sebagai bentuk dari efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran atau *output* (Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019). Dalam menyusun penganggaran berbasis kinerja dituntut adanya perencanaan strategik yang disusun secara objektif dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti dana yang ada,

sumber daya manusia, dan metode kerja yang secara akurat dan rasional dapat diinformasikan dalam suatu anggaran sehingga dapat dinilai kewajarannya sebagai bentuk dari Analisa Standar Biaya atau biasa disingkat ASB (Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019).

Hasil pengujian hipotesis antar variabel secara simultan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang cukup signifikan antara penerapan rancangan anggaran berbasis kinerja dengan pencegahan *fraud* pada sektor publik sebesar 98,4% sedangkan sisa 1,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain, maknanya setiap perubahan satuan pada anggaran berbasis kinerja terhadap pencegahan *fraud* dapat menyebabkan perubahan dalam mencegah terjadinya *fraud* dalam jenis apapun, baik itu dalam kasus *fraudulent statement*, *asset misappropriation*, dan koeupsi kea rah yang lebih positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Ririnda dan Sudaryati (2020) bahwa anggaran merupakan sebuah instrumen ekonomi dalam mengelola suatu daerah yang harus diimbangi dengan pelaporan kinerja dari anggaran, semakin tinggi tingkat ketepatan anggaran maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang menyebabkan kemungkinan terjadinya *fraud* menjadi lebih kecil.

Anggaran berbasis kinerja dapat menjadi alat pengendali dalam meminimalisir tindak *fraud* utamanya dengan menutup unsur kesempatan atau peluang yang mejadi salah satu faktor penyebab terjadinya *fraud* dalam *fraud triangle theory*, hal ini sejalan dengan dengan penelitian Syamsudin (2012) yang dikutip oleh Aksa (2018) menyatakan bahwa penggunaan *fraud triangle theory* yang didukung oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat dapat mengurangi frekuensi terjadinya *fraud* sektor publik juga

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aksa (2018) Pemahaman teori *fraud triangle* dapat mendeteksi dan mencegah *fraud* dengan cara perbaikan fungsi pengendalian dan pengawasan, agar dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik.

Pencegahan *fraud* di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Sidenreng Rappang membuktikan bahwa secara pengawasan dan pengendalian *fraud* yang terjadi sudah lebih baik dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja yang disusun berdasarkan analisa standar belanja dan indikator-indikator lain. Dengan demikian diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan perencanaan daerah yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hal yang dapat disimpulkan dari penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk meninjau pengaruh penerapan rancangan anggaran dalam mencegah *fraud* sektor publik. Untuk mempersempit cakupan pada penelitian ini digunakan anggaran berbasis kinerja sebagai variabel dari rancangan anggaran dengan hasil analisis yaitu penerapan rancangan anggaran berbasis kinerja memberikan pengaruh positif secara signifikan sebesar 98,4% terhadap pencegahan *fraud* sektor publik jika telah disusun secara objektif dan sesuai dengan analisis standar biaya, akan tetapi masih belum cukup untuk mencegah *fraud* secara menyeluruh karena ada faktor lain sebesar 1,6%.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan saran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu untuk menambahkan jumlah variabel dalam penelitian selanjutnya dengan lebih mempertimbangkan kesesuaian antar variabel serta lebih memaksimalkan model penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., Noorhayati Mansor, M., & Nuhu, S. (2020). *Fraud Triangle and Fraud Diamond Theory: Understanding The Convergent for Future Research*. Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tanjung/id/data-publikasi/artikel/2880-jr,html#_ftn1
- Ajatappareng Online. (, December). *Kejari Endus Dugaan Korupsi Penimbunan RS Pratama Sidrap, Adityo: Tersangka Sudah Ada. 2021.* <https://ajatappareng.online/kejari-endus-dugaan-korupsi-penimbun-rs-pratama-adityo-tersangka-sudah-ada>
- Aksa, A. F. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 2.
- Aksa, A. F., Irianto, B. S., & Bawono, I. R. (2020). The Urgency of Rationalization for Unethical Behavior and Accounting Fraud. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 653–664. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.37>
- Amaliyah. (2019). Apakah Accounting Fraud Disebabkan Kesalahan Individu Atau Budaya Organisasi? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 569–582. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.33>
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44.
- Anisah, H. N., & Falikhatun, F. (2021). Realitas Pengawasan Di Tubuh Pemerintahan Desa Terhadap Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 153–172. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.09>
- Anonym. (2020). *Jenis-jenis Fraud*. BINUS University. <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-fraud/>
- Asad, A. F., & Musyarofah, S. (2019). Reorientasi Audit Internal untuk Melawan Korupsi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 583–601.
- Bachtiar, I. H., & Elliyana, E. (2020). Determinan upaya pencegahan fraud pemerintah desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam (IMANESI)*, 5(2), 61–68.
- Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja*. <https://diklat.jogjaprovo.go.id/350-perencanaan-dan-penganggaran-berbasis-kinerja/>
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Sidrap. (2016). *Profil Badan Keuangan dan Aset*

- Daerah*. http://sidrapkab.go.id/site/file/dokumen/LAKIP_BPKD021117.pdf
- BINUS Faculty of Economics and Communication. (2021). *Fraud Diamond, Extension of Fraud Triangle*. BINUS University. <https://accounting.binus.ac.id/2020/04/23/fraud-diamond-extension-of-fraud-triangle>
- Biswan, A. T., & Widiyanto, H. T. (2019). Peran Beyond Budgeting Entry Scan Untuk Mengatasi Permasalahan Penganggaran Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2), 308–327. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10018>
- BPKAD Banjar. (2018). *Fungsi Anggaran dalam Berbagai Aspek*. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/02/13/fungsi-anggaran-dalam-berbagai-aspek/>
- Cahyadi, A. (2021, January 11). Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Disdik Sidrap Divonis 4 Tahun Penjara. *ParePos*. <https://parepos.co.id/2021/01/tiga-terdakwa-kasus-korupsi-disdik-sidrap-divonis-4-tahun-penjara>
- CNBC Indonesia. (2021, October 11). Ada 5.000 Kasus Perbulan, Indonesia Emergency Kejahatan Siber. *CNBC Indonesia*.
- DetikEdu. (2021). *Jenis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Detik.Com. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5536167/jenis-penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif>
- Dewi, S. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *LAND JOURNAL*, 1(2), 117–124. <https://ejurnal.poltekpos.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/703/529>
- Esni, M. T., Made, A., & Wulandari, R. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(2), 1–11.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. (2017). *Probability Sampling vs Non-Probability Sampling*. BINUS University. <https://student-activity.binus.ac.id/himsisifo/2017/03/probably-sampling-vs-non-probability-sampling/>
- Inspektorat Way Kanan. (2020). *Upaya Mendeteksi Kecurangan Fraud*. Inspektorat Way Kanan. <https://inspektorat.waykanankabgo.id/detailpost/upaya-mendeteksi-kecurangan-fraud>
- Integrity Indonesia. (2021). *Kesadaran Fraud Meningkat Signifikan Selama Pandemi*. Integrity Indonesia. <https://www.integrity-indonesia.com/id/blog/2021/10/28/kesadaran-fraud-meningkat-signifikan->

selama-pandemi/

- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yz8KEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA216&dq=metode+pengumpulan+data+kuantitatif&ots=snyC-TyTcW&sig=k8XylxzQG2MEP-gKWmaZrKMkZAs&redir_esc=y#v=onepage&q=kuesioner&f=false
- Kementerian Keuangan. (2007). *Money Follow Function dalam Penganggaran Berbasis Kinerja*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. www.anggaran-old.kemenkeu.go.id/edef-konten-view.asp?id=247
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Pedoman perencanaan dan penganggaran* (B. P. Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1 (ed.)). Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://roren.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2021/04/Pedoman-Perencanaan-dan-Penganggaran.pdf>
- Kristiani, Y., Mokhlas, M., & Sukanto, E. (2018). Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating. *Stability: Journal of Management and Business*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.26877/sta.v1i1.2615>
- Kristiyani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Madjid, N. C. (2020). Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran: Tantangan Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran Yang Efektif dan Efisien. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1075.
- Management. (2019). *Analisis Regresi Sederhana*. BINUS University Business School. <https://bbs.binus.ac.id/management/2019/12/analisis-regresi-sederhana/>
- Mariasari, V., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Periode 2018-2020. *JRAMB*, 7(2), 190–198.
- Mashabi, S. (2020, September 29). ICW: Ada 169 Kasus Korupsi Sepanjang Semester I 2020. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>
- Meiryani. (2021a). *Memahami Uji Asumsi Klasik dalam Penelitian Ilmiah*. BINUS University School of Accounting. [https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-asumsi-klasik-dalam-penelitian-ilmiah/#:~:text=Uji asumsi klasik adalah persyaratan,ordinary leas square \(OLS\).](https://accounting.binus.ac.id/2021/08/06/memahami-uji-asumsi-klasik-dalam-penelitian-ilmiah/#:~:text=Uji asumsi klasik adalah persyaratan,ordinary leas square (OLS).)

- Meiryani. (2021b). *Memahami Uji F (Uji Simultan) dalam Regresi Linear*. BINUS University School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/21/08/12/memahami-uji-f-uji-simultan-dalam-regresi-linear/>
- Meiryani. (2021c). *Memahami Uji T dalam Regresi Linear*. BINUS University School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-uji-t-dalam-regresi-linear/>
- Nathanael, A. (2022). *ACFE Fraud Tree: Schemes in the Company*. BINUS University School of Accounting. <https://accounting.binus.ac.id/2022/07/19/acfe-fraud-tree-schemes-in-the-company/>
- Nst, A. P., & Handoko, B. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15–25.
- Nurkholis, & Moh., K. (2019). *Pengantar Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Parulian, T. Ms. (2020). *Analisis Regresi Sederhana*. <http://tohapparulian.blog.uma.ac.id/category/materi-kuliah/>
- Polii, I. R. ., Saerang, D. P. E., & Tangkuman, S. J. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA*, 8(4), 781–788.
- Primastiwi, A., Wardani, D. K., & Kitna, H. M. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kinerja Sektor Publik dengan Budaya Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 5(2), 24–35.
- Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). Faktor yang mempengaruhi pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 2(2), 580–585.
- Putri, A. A., Mira, & Sulistiyanti, R. (2021). *Prosedur Penerapan Anggaran Belanja dalam Kegiatan Operasional pada PT Perkebunan Nusantara*. 5(2), 550–559. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i2.2487>
- Rakhmawati, I., Raden Sapto Hendri, & Nungki Kartikasari. (2021). Kebijakan Transparansi Dan Akuntabilitas: Mampukah Mencegah Penyelewengan Dana Desa? *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v20i1.119>
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1099. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p03>
- Rohim, M. A. A., Sudaryanti, D., & Hariri. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- dalam Mencegah Fraud. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Romenda, A. Y., & Ningsih, E. S. (2020). Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(1), 50–58.
- Safitri, F. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektivitas Realisasi Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4083–4094.
- Salam, R. (2020). Analisis dinamika permasalahan implementasi anggaran pemerintah daerah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 1–12.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. . N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.915.168-176> Abstract
- Sari, M. S., Suhendar, & Nofitri, R. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (studi pada Dinas perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan). *Jurnal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 3(1), 1–9.
- Sari, N. A. (2021). *Waspada Fraud! Begini Cara Deteksinya*. Inspektorat Jendral Kementerian PUPR. https://itjen.pu.go.id/single_kolom/82
- Sarwenda Biduri. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik* (M. T. M. Sartika, Septi Budi (ed.); 1st ed.). UMSIDA Press.
- Sholehah, N. L. H. (2019). Analisis Akuntabilitas Kinerja Anggaran Dengan Perspektif Amanah Dalam Mencegah Fraud Pada Dkad Provinsi Gorontalo. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 216–228.
<https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i1.142>
- Sitoresmi, A. R. (2021). *Purposive Sampling Adalah Teknik Pengambilan Sampel, Ketahui Definisi dan Tujuannya*. Liputan 6.
<https://hot.liputan6.com/read/4532197/purposive-sampling-adalah-teknik-pengambilan-sampel-ketahui-definisi-dan-tujuannya>
- Suharkono, D. (2019). Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Malang. *Karta Rahardja*, 1(2).
- Syafnidawati. (2020a). *Data Primer*. Universitas Raharja.
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>
- Syafnidawati. (2020b). *Data Sekunder*. Universitas Raharja.
<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- Universitas Raharja. (2020). *Apa itu Populasi dan Sampel*. Universitas Raharja.
<https://raharja.ac.id/2020/11/04/apa-itu-populasi-dan-sampel-dalam->

LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Responden

Pegawai BKAD Kab. Sidenreng Rappang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Dalam rangka penuisan dan peyusunan tugas akhir (Skripsi) studi Akuntansi (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan ini saya:

Nama : Dian Fauzia

Nim : 105731127318

Bermaksud melakukan penelitian mengenai topik yang saya angkat yakni **“Pengaruh Penerapan Rancangan Anggaran dalam Mencegah Fraud Sektor Publik”**, sehubungan dengan hal tersebut saya memerlukan data berupa informasi dari Bapak/Ibu. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berpartisipasi dan mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Data tersebut akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk keperluan akademis penelitian semata.

Atas keediaan Bapak/Ibu dalam berpartisipasi dan mengisi kuesioner ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Dian Fauzia

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Jabatan :
5. Pendidikan terakhir :
6. Latar Belakang Pendidikan :
7. Masa Kerja di SKPD BKAD SIDRAP :

B. PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda *check list* (√) pada kolom yang tersedia di lembar tabel pertanyaan yang telah disediakan

Keterangan :

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 N : Netral
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

C. DAFTAR PERTANYAAN

Daftar Singkatan yang akan ditemui dalam pertanyaan dibawah:

1. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. KUA : Kebijakan Umum Anggaran
4. PPAS : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
5. BUD : Bendahara Umum Daerah
6. LRA : Laporan Realisasi Anggaran
7. PPA : Pejabat Pengguna Anggaran
8. PPKD : Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah
9. DPA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
10. RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
11. LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Anggaran (X)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Dokumen RPJMD yang disusun sudah menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang ingin dicapai.					
2.	RKPD memuat mengenai kerja yang terukur dan pendanaannya.					
3.	Dokumen KUA didasarkan pada dokumen RKPD dalam periode tersebut.					
4.	SKPD dalam hal perencanaan anggarannya mengikuti prioritas dan PPAS dalam menyusun RKA-SKPD.					
5.	Penyusunan RKA-SKPD didasarkan pada pagu anggaran yang tercantum dalam nota kesepakatan PPA antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.					
6.	Adanya sinkronisasi program dan kegiatan antara SKPD dan kinerja SKPD sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.					
7.	Dalam penyusunan RKA-SKPD memperhatikan prinsip-prinsip					

	peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
8.	Dalam penyusunan RKA-SKPD, RAPBD serta pembahasannya mengacu pada KUA dan PPAS yang telah disepakati antara pemerintah, DPRD, dan SKPD itu sendiri.					
9.	Penetapan APBD menjadi peraturan daerah dilakukan setelah adanya evaluasi APBD dari provinsi dan evaluasi APBD dari kabupaten/kota.					
10.	Dalam pelaksanaan anggaran SKPD mengacu pada DPA dan rencana anggaran kas yang telah disahkan.					
11.	Dokumen anggaran kas dan DPA digunakan oleh BUD sebagai acuan dalam penyediaan dana untuk setiap SKPD.					
12.	SKPD dalam pelaksanaan anggarannya telah mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja					

	sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam dokumen DPA dan anggaran kas					
13.	Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi.					
14.	Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
15.	Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda dan laporan keuangan perusahaan untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					
16.	Adanya evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.					
17.	Adanya evaluasi terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas apakah telah sesuai dengan target yang ditetapkan.					
18.	Setelah melaksanakan evaluasi kinerja adanya reward yang diberikan kepada					

	SKPD yang mencapai target anggaran.					
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

FRAUD SEKTOR PUBLIK (Y)

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
19.	Instansi tidak memberikan aturan yang ketat mengenai pencatatan transaksi atau penggunaan anggaran baik secara tunai maupun non tunai.					
20.	Di instansi tempat saya bekerja, merupakan hal yang wajar apabila untuk suatu tujuan tertentu biaya dicatat lebih besar dari semestinya.					
21.	Di instansi tempat saya bekerja pencatatan bukti transaksi dilakukan tanpa otoritas pihak yang berwenang.					
22.	Di instansi tempat saya bekerja, suatu hal yang wajar apabila para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan kantor.					
23.	Di instansi tempat saya bekerja, bukan suatu masalah apabila perlengkapan dan					

	peralatan kantor yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dibeli.					
24.	Di instansi tempat saya bekerja, bukan menjadi masalah apabila ditemukan pengeluaran tanpa dokumen pendukung.					
25.	Di instansi tempat saya bekerja, bukan menjadi suatu masalah bagi instansi saya apabila sisa anggaran dibagikan kepada pegawai sebagai bonus.					
26.	Saya merasa kalau tepat kerja saya adalah "milik" saya.					
27.	Saya pernah meminjam uang anggaran instansi, namun segera saya kembalikan.					
28.	Saya senang membantu rekan kerja serta teman-teman saya yang sedang mengalami kesulitan keuangan dengan cara meminjam uang anggaran di tempat kerja saya.					
29.	Di instansi tempat saya bekerja, tidak menjadi masalah menggunakan kendaraan dinas untuk tujuan berwisata keluarga.					

30.	Di instansi tempat saya bekerja, tidak menjadi masalah untuk memperpanjang atau memperlama waktu perjalanan dinas dari yang seharusnya.					
31.	Di instansi tempat saya bekerja, tidak menjadi masalah untuk membawa pulang peralatan dan persediaan instansi untuk kepentingan pribadi.					
32.	Di instansi tempat saya bekerja, tidak menjadi masalah untuk mencatat hutang lebih tinggi dari seharusnya.					
33.	Di instansi tempat saya bekerja, tidak menjadi masalah apabila memasukkan kebutuhan lain yang tidak sesuai dalam belanja peralatan maupun persediaan kantor.					
34.	Di instansi tempat saya bekerja, menjadi hal yang wajar untuk meminta reimbursement yang lebih besar daripada seharusnya.					
35.	Atasan saya meminta saya untuk mengubah catatan keuangan dengan tujuan tertentu.					

36.	Saya seringkali tidak melakukan pekerjaan saya pada jam kantor dan melakukannya pada jam lembur untuk mendapatkan gaji lembur.					
37.	Menjadi hal yang wajar di instansi tempat saya bekerja untuk menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan liburan bersama setiap bulannya

LAMPIRAN 2 : HASIL KUESIONER

Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	JUMLAH
1	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	84
2	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	4	82
3	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	85
4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	83
5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	84
6	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	82
7	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	87
8	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	83
9	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	83
10	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	83
11	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	82
12	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	84
13	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	83
14	4	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	4	4	81
15	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	87
16	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	4	84
17	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	5	5	84
18	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	84
19	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	81
20	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	83
21	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	83
22	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	85
23	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	83
24	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	83

Variabel Fraud (Y)

NO	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	JUMLA H
1	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	89
2	5	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	87
3	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	89
4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	87
5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	89
6	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	86
7	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	92
8	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	88
9	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	5	88
10	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	87
11	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	87
12	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	88
13	4	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	5	4	87
14	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	86
15	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	92
16	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	89
17	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	89
18	4	4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	88
19	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	85
20	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	88
21	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	88
22	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	90
23	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	5	88
24	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	87

LAMPIRAN 3: UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

1. Uji Validitas

Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Correlations

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	TotalX
P1 Pearson Correlation	1	,292*	-,027	-,018	,069	,229*	,037	-,015	,119	,086	,228*	,072	,101	,037	-,087	-,069	-,045	-,082	,271*
Sig. (2-tailed)		,010	,816	,878	,552	,045	,751	,897	,304	,459	,046	,532	,381	,751	,451	,553	,696	,478	,017
N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P2 Pearson Correlation	,292*	1	,409*	,084	,040	,128	-,005	-,038	,005	,194	,144	-,137	,209	-,110	,021	,079	,084	-,080	,331**
Sig. (2-tailed)	,010		,000	,469	,730	,268	,963	,743	,968	,090	,211	,233	,068	,340	,853	,492	,466	,489	,003
N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P3 Pearson Correlation	-,027	,409*	1	,292*	,220	-,075	-,047	-,111	-,159	,304*	-,144	,084	,266*	,005	,079	,073	,114	-,026	,322**
Sig. (2-tailed)	,816	,000		,010	,054	,516	,685	,338	,168	,007	,211	,469	,019	,963	,497	,525	,324	,821	,004
N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P4 Pearson Correlation	-,018	,084	,292*	1	,359*	-,132	,011	-,086	-,029	,215	,037	,217	,106	,118	,132	,057	,405*	,182	,419**
Sig. (2-tailed)	,878	,469	,010		,001	,254	,928	,456	,804	,060	,750	,058	,359	,305	,251	,625	,000	,114	,000
N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P5 Pearson Correlation	,069	,040	,220	,359*	1	-,067	,064	,037	-,093	,160	,117	,178	,169	,116	-,014	-,118	,112	,037	,338**

	Sig. (2-tailed)	,552	,730	,054	,001		,560	,581	,748	,421	,164	,312	,122	,142	,314	,902	,308	,333	,748	,003
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P6	Pearson Correlation	,229*	,128	-,075	-,132	-,067	1	,234*	,114	,207	-,180	,405*	,132	-,145	-,030	,194	,029	,093	,145	,325**
	Sig. (2-tailed)	,045	,268	,516	,254	,560		,040	,323	,071	,118	,000	,254	,210	,794	,090	,800	,422	,208	,004
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P7	Pearson Correlation	,037	-,005	-,047	,011	,064	,234*	1	,288*	,187	-,001	,116	,151	,099	,157	,122	,112	,116	,177	,403**
	Sig. (2-tailed)	,751	,963	,685	,928	,581	,040		,011	,103	,996	,314	,189	,390	,172	,290	,330	,313	,124	,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P8	Pearson Correlation	-,015	-,038	-,111	-,086	,037	,114	,288*	1	,186	-,010	,235*	,137	,140	,138	,109	,209	,035	-,035	,341**
	Sig. (2-tailed)	,897	,743	,338	,456	,748	,323	,011		,105	,928	,040	,234	,224	,230	,347	,068	,763	,760	,002
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P9	Pearson Correlation	,119	,005	-,159	-,029	-,093	,207	,187	,186	1	,080	,061	-,077	,071	,084	,246*	,123	,168	,299*	,359**
	Sig. (2-tailed)	,304	,968	,168	,804	,421	,071	,103	,105		,488	,601	,507	,540	,466	,031	,286	,143	,008	,001
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P10	Pearson Correlation	,086	,194	,304*	,215	,160	-,180	-,001	-,010	,080	1	,110	,144	,195	,350*	-,027	,107	,111	,016	,412**
	Sig. (2-tailed)	,459	,090	,007	,060	,164	,118	,996	,928	,488		,339	,211	,089	,002	,814	,355	,338	,891	,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P11	Pearson Correlation	,228	,144	-,144	,037	,117	,405*	,116	,235	,061	,110	1	,178	-,200	-,041	,135	,238*	,013	-,016	,375**

	Sig. (2-tailed)	,696	,466	,324	,000	,333	,422	,313	,763	,143	,338	,912	,361	,141	,148	,043	,000		,000	,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P1	Pearson																			
8	Correlation	-,082	-,080	-,026	,182	,037	,145	,177	-,035	,299*	,016	-,016	,037	,060	,177	,240*	,328*	,499*	1	,424**
	Sig. (2-tailed)	,478	,489	,821	,114	,748	,208	,124	,760	,008	,891	,891	,750	,604	,124	,036	,004	,000		,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Tot	Pearson																			
alX	Correlation	,271*	,331*	,322*	,419*	,338*	,325*	,403*	,341*	,359*	,412*	,375*	,399*	,419*	,418*	,416*	,456*	,550*	,424*	1
	Sig. (2-tailed)	,017	,003	,004	,000	,003	,004	,000	,002	,001	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

P36	Pearson Correlation	-,080	-,082	,182	-,026	,177	,037	,145	-,016	,037	,060	,177	,240*	,328*	-,035	,299*	,016	,499*	1	,037	,406**
	Sig. (2-tailed)	,489	,478	,114	,821	,124	,748	,208	,891	,750	,604	,124	,036	,004	,760	,008	,891	,000		,748	,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
P37	Pearson Correlation	,040	,069	,359*	,220	,064	1,000**	-,067	,117	,178	,169	,116	-,014	-,118	,037	-,093	,160	,112	,037	1	,455**
	Sig. (2-tailed)	,730	,552	,001	,054	,581	,000	,560	,312	,122	,142	,314	,902	,308	,748	,421	,164	,333	,748		,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Total Y	Pearson Correlation	,319*	,266*	,445*	,334*	,390*	,455*	,298*	,371*	,401*	,419*	,411*	,391*	,415*	,327*	,327*	,411*	,535*	,406*	,455*	1
	Sig. (2-tailed)	,005	,020	,000	,003	,000	,000	,008	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,004	,004	,000	,000	,000	,000	,000
	N	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Uji Reabilitas

Hasil uji variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)
Fraud (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,668	18

Hasil uji variabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,687	19

BIOGRAFI PENULIS

Dian Fauzia lahir pada tanggal 30 Juli 2000 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dari pasangan suami istri Bapak La Ode Ahmad dan Ibu Hariana. Peneliti merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Peneliti pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri 11 Pangsid dan lulus tahun 2012, pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Pangsid dan lulus pada tahun 2015, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMA Negeri 2 Sidrap dan lulus pada tahun 2018. Peneliti melanjutkan pendidikan di program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.